

**PENGARUH *MORAL REASONING*, RETALIASI, *ETHICAL SENSITIVITY*
DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP NIAT MELAKUKAN
*WHISTLEBLOWING***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

DEBY NOFRIZALDI

NIM.18043083/2018

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *MORAL REASONING*, RETALIASI, *ETHICAL SENSITIVITY* DAN
KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP NIAT MELAKUKAN
*WHISTLEBLOWING***

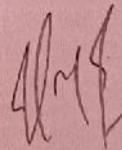
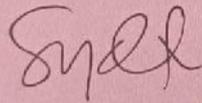
Nama : Deby Nofrizaldi
NIM / TM : 18043083 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Diseetujui Oleh

Ketua Departemen Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D

Navang Helmayuuta, S.E, M.Sc

NIP. 19800103 200212 2 001

NIP. 19860127 200812 2 001

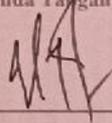
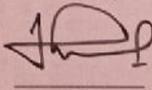
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity* dan
Komitmen Profesional Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*
Nama : Deby Nofrizaldi
NIM / TM : 18043083 / 2018
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Tim Penguji,

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc	1. 
2	Anggota	Henri Agustin, S.E, M.Sc, Ak	2. 
3	Anggota	Mia Angelina Setlawan, SE, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deby Nofrizaldi
NIM/Tahun Masuk : 18043083/2018
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu/ 10 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Salak 8 Rt. 13 Rw. 05 Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu
No. HP/Telp : 082185734082
Judul Skripsi : Pengaruh *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity* dan Komitmen Profesional Terhadap Niat Melakukan *Whisrleblowing*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022
Saya yang Menyatakan

Deby Nofrizaldi
18043083/2018

ABSTRAK

Nofrizaldi, Deby. (18043083/2018). Pengaruh *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity* dan Komitmen Profesional Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*.

Pembimbing : Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity*, dan Komitmen Profesional terhadap niat untuk melakukan *Whistleblowing*. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, dan BPKD Kabupaten Padang Pariaman. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Moral Reasoning* berpengaruh positif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*, Retaliasi berpengaruh negatif terhadap niat melakukan *Whistleblowing*, *Ethical Sensitivity* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *Whistleblowing* dan Komitmen Profesional berpengaruh positif terhadap niat. untuk melakukan *Whistleblowing*.

Kata Kunci : *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity*, Komitmen Profesional dan *Whistleblowing*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Moral Reasoning*, Retaliasi, *Ethical Sensitivity* dan Komitmen Profesional Terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulisan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Mama Mishartisam, Papa Burak, Bude Yulisnawati, Ibuk Sri Aminah, Ami Neni Gusni Yenti, Om Riko dan Uncu Imaneti yang telah memberikan dukungan moril dan materil, do'a, semangat, dan kasih sayang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
2. Ibu Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc selaku pembimbing yang telah sangat sabar membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta menjadi motivator bagi saya.

3. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
7. Bapak Dovi Septiari, S. E, M. Sc dan Ibu Nayang Helmayunita, S.E, M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Sindy Putri Nur Rahmadanni selaku pendamping yang telah memberikan semangat, dukungan serta masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.

10. Wahyu, Lubis, Wikky dan Taher telah menemani dari awal perkuliahan, penyusunan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan perkuliahannya.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi kelas B 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat, semoga kita semua sukses.
12. Seluruh teman-teman “GenBI VII dan VIII” yang telah memberikan dukungan dan semangat.
13. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu, mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat sebagai rujukan/pelajaran dalam penulisan skripsi yang lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan mengharap saran dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. <i>Theory of Planned Behavior</i>	12
2. <i>Whistleblowing</i>	13
3. <i>Moral Reasoning</i> (Penalaran Moral)	16
4. Retaliasi.....	19
5. <i>Ethical Sensitivity</i> (Sensitivitas Etis)	22
6. Komitmen profesional	24
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Pengembangan Hipotesis.....	30
1. Pengaruh <i>Moral Reasoning</i> Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	30
2. Pengaruh Retaliasi Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	32
3. Pengaruh <i>Ethical Sensitivity</i> Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	34
4. Pengaruh Komitmen Profesional Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i>	35
D. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel Penelitian	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	40
1. Variabel Dependen.....	40
2. Variabel Independen	41
a. Moral Reasoning.....	41
b. Retaliasi	41
c. Ethical Sensitivity	42
d. Komitmen Profesional	42
E. Instrumen Penelitian	43
F. Metode Analisis Data.....	44
1. Analisis Statistik Deskriptif	44
2. Uji Kualitas Data.....	45
a. Uji Validitas	45
b. Uji Reliabilitas	45
3. Uji Asumsi Klasik.....	45
a. Uji Normalitas.....	46
b. Uji Multikolinieritas.....	46
c. Uji Heteroskedastisitas	47
4. Uji Hipotesis	47
a. Analisis Regresi Linear Berganda	47
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	48
c. Uji Signifikan Simultan (Uji-F).....	48
d. Uji Parsial (Uji-t)	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Demografi Responden	52
C. Analisis Statistik Deskriptif.....	54
D. Uji Kualitas Data	56
E. Uji Asumsi Klasik	58
F. Uji Hipotesis	61
G. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	72

A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan	73
C. Saran	73
D. Implikasi.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Rincian Jumlah Pegawai	51
Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Kuesioner.....	51
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	53
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	54
Tabel 4.7 Statistika Deskriptif.....	55
Tabel 4.8 Uji Validitas	57
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	62
Tabel 4.14 Hasil Koefisien Determinan (R^2)	63
Tabel 4.15 Hasil Signifikan Simultan (Uji-F).....	64
Tabel 4.16 Hasil Passial (Uji-t).....	65

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya perekonomian, tindakan kejahatan perekonomian juga mengalami perkembangan dengan berbagai macam bentuk. Kecurangan atau *fraud* merupakan salah satu praktik kejahatan yang ada didalam dunia akuntansi. Secara umum *fraud* diartikan sebagai kecurangan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan material maupun non material (Handika & Sudaryanti, 2018). *Fraud* dilakukan karena adanya kesempatan, peluang, tekanan, pembenaran atas apa yang dilakukan, dan dasar-dasar tertentu yang menjadi alasan untuk melakukannya (Nurharjanti, 2017).

Whistleblower adalah orang yang memberi tahu publik atau seseorang yang berwenang tentang dugaan kegiatan tidak jujur atau ilegal (pelanggaran) yang terjadi di departemen pemerintah, organisasi publik atau swasta, atau perusahaan. Dapat juga dikatakan bahwa fenomena *whistleblowing* muncul ketika seorang karyawan melaporkan dugaan pelanggaran di tempat kerjanya dan mengambil tindakan dengan melakukan pengungkapan untuk kepentingan publik (Susmanschi, 2012). Seseorang yang melakukan *whistleblowing* disebut juga dengan *whistleblower*. Semendawai *et al.*, 2011 dalam (Daniyarti, 2020) berpendapat bahwa

seseorang menjadi *whistleblower* bisa dilatar belakangi oleh berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam, ingin menjatuhkan institusi tempatnya bekerja, ataupun untuk menciptakan lingkungan organisasi tempatnya bekerja menjadi lebih baik.

Indonesia termasuk negara nomor tiga di Asia dengan tingkat korupsi yang tinggi sepanjang tahun 2020 berdasarkan rilis lembaga pemantauan indeks korupsi *Global Transparency International* dalam laporan yang bertajuk *Global Corruption Barometer-Asia* (www.merdeka.com). Tentu saja kasus-kasus penyimpangan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 yang melarang akuntan publik memanipulasi, membantu manipulasi, dan memalsukan data terkait pelayanan yang diberikan, serta UU No. 28 Tahun 1999, yang menyerukan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Awal mulai fenomena *whistleblowing* terjadi di Amerika Serikat, kasus kecurangan (*fraud*) yang terkenal adalah kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001. Pada kasus tersebut Enron melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan agar sahamnya banyak diminati investor. Kasus tersebut juga melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi *off balance sheet* dan penetapan kompensasi yang tinggi bagi eksekutif perusahaan. Hal ini berarti

bahwa Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang sahamnya dan merugikan kepentingan para pemegang sahamnya. Kasus yang melibatkan adanya pelanggaran etika dalam akuntansi ini memicu Sherron Watkins seorang Eksekutif Enron menjadi seorang *whistleblower* dan mengungkapkan skandal tersebut. Akibat dari terungkapnya kasus tersebut adalah Enron mengalami kerugian dan kebangkrutan.

Indonesia sendiri juga terdapat kasus *whistleblowing* yaitu kasus mafia pajak yang di ungkapkan oleh Susno Duaji. Kasus tersebut menyeret Gayus Tambunan yaitu seorang staf Direktorat Jenderal Pajak. Kasus tersebut bermula saat kecurigaan Susno Duadji terhadap uang sebanyak 25 miliar Rupiah yang berada di rekening Gayus Tambunan. Akhirnya dilakukan penyelidikan ternyata uang tersebut merupakan hasil dari penggelapan pajak, kemudian Susno Duaji melaporkannya kepada pihak yang berwajib (news.detik.com)

Kasus *whistleblowing* juga terjadi di Sumatera Barat yang terjadi di Payakumbuh yang terjadi tahun 2015 yaitu kasus dugaan korupsi pembangunan Drainase di Jalan Tan Malaka. Kasus ini menyeret Zul Arman sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Payakumbuh. Terbongkarnya kasus tersebut berawal sejak tahun 2015, pembangunan Drainase tersebut menggunakan APBD Kota Payakumbuh 2014 senilai Rp 984 Juta. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Dinamo dari Juni hingga

Desember 2014. Memasuki tahun 2015 Drainase sepanjang 300 Meter tersebut tidak berfungsi semestinya sehingga badan Jalan Tan Malaka meluap hingga tergenang air. Pelapor (*Whistleblower*) pada kasus ini adalah salah seorang anggota LSM Kota Payakumbuh melaporkan ke Kejari Payakumbuh (www.harianhaluan.com)

Pemerintah merespon banyaknya kasus korupsi terjadi di Indonesia, untuk menekan kasus korupsi. Strategi yang dapat dilakukan melalui pencegahan, pendeteksian, hingga penuntutan (Prayogi & Suprajitno, 2020). Pada 10 November 2008 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) membuat suatu Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). Dengan adanya peraturan tersebut individu wajib melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai (Setiawati & Sari, 2016).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perilaku Pelapor dan Pelaku yang mengatur tentang *whistleblowing* di Indonesia. Dengan peraturan tersebut sistem pelaporan pelanggaran organisasi sangat penting, sehingga diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif agar dapat meningkatkan partisipasi individu dalam melaporkan kecurangan.

Whistleblowing System merupakan strategi yang dilakukan untuk menekan kecurangan yang terjadi pada saat ini. Dengan *Whistleblowing System* setiap pegawai berkesempatan melaporkan tindakan koruptif atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh rekan kerja maupun atasannya, kemudian pelapor akan mendapatkan perlindungan. Dengan adanya *whistleblowing* dipercaya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi, agar kecurangan tersebut tidak berkelanjutan yang akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar.

Whistleblower harus memiliki sikap kinerja yang baik, beredukasi tinggi, berkedudukan sebagai pengawas, dan memiliki penalaran moral yang lebih tinggi dibandingkan seorang pengawas *fraud* yang tidak aktif (Elias, 2008). Dalam mengungkap suatu kecurangan *whistleblower* memerlukan keberanian dan keyakinan karena resiko yang diterima oleh para *whistleblower* bisa berupa pemecatan, teror serta dikucilkan dilingkungan organisasi. Apakah individu yang mengetahui terjadinya kecurangan mau melaporkan atau tidak merupakan penerapan dari *whistleblowing*.

Menurut Tjahjono, 2013 dalam (Ahyaruddin & Asnawi, 2017) sebuah laporan oleh *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, dengan adanya *whistleblowers* sekitar setengah kasus kecurangan (*fraud*) bisa terungkap. Hanya sekitar seperempat dari kasus *fraud* terungkap karena internal audit, dan seperempatnya lagi terungkap oleh adanya proses *internal control* atau bahkan secara tidak sengaja. Sehingga *whistleblowers*

mempunyai peran yang penting dalam mengungkapkan suatu kecurangan (*fraud*) dalam organisasi sehingga dapat mencegah kerugian bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan *whistleblowing*, diantaranya seperti *moral reasoning*, retaliasi, *ethical sensitivity*, dan komitmen profesional. Menurut Welton *et al.* (1994) dalam (Ayuningtyas, 2018) *moral reasoning* adalah proses yang diikuti individu dalam pengambilan keputusan yang melibatkan isu etika. Dapat diartikan *moral reasoning* adalah suatu cara yang dilakukan oleh individu untuk memandang baik atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shawver & Shawver (2018); Liyanarachchi & Newdick (2009) menemukan bahwa tingkat *moral reasoning* individu berpengaruh pada niat *whistleblowing* untuk manajemen internal. Namun, hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fedrica & Chariri (2012) yang menyatakan *moral reasoning* tidak berpengaruh signifikan terhadap *whistleblowing*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil yang belum konsisten, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian kembali yaitu pengaruh *moral reasoning* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Berbanding terbalik dengan *moral reasoning*, retaliasi merupakan salah satu faktor penghambat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Retaliasi merupakan tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan

terhadap *whistleblower* sebagai konsekuensi dari tindakan *whistleblowing* tersebut (Rehg et al., 2008). Retaliasi adalah bentuk paksaan atau konsekuensi untuk para *whistleblowing* agar tetap menutup mulut ketika mengetahui sebuah kecurangan (*fraud*) pada suatu organisasi (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Yang & Xu (2020); Liyanarachchi & Newdick (2009) retaliasi berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Conella & Dwita (2020) dan Ayuningtyas (2018) retaliasi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Karena hasil yang tidak konsisten dan peneliti ingin melihat keterbaruan dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan tindakan *whistleblowing* adalah sensitivitas etis (*Ethical Sensitivity*). *Ethical Sensitivity* merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu untuk mengetahui masalah-masalah etis yang terjadi baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Kemampuan seorang profesional untuk berperilaku etis sangat dipengaruhi oleh sensitivitas individu itu sendiri. Dalam diri individu pasti mempunyai sensitivitas terhadap etika yang berbeda-beda (Falah, 2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badrullhuda et al., (2021) dan Janitra (2017) menyatakan bahwa *ethical sensitivity* berpengaruh terhadap *whistleblowing*. Variabel *ethical sensitivity*

masih sedikit yang melakukan untuk *whistleblowing* sebagai variabel independennya. Sehingga peneliti tertarik meneliti pengaruh *ethical sensitivity* terhadap *whistleblowing*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi niat seseorang melakukan *whistleblowing* adalah komitmen profesional. Suatu tanggung jawab, ikatan, loyalitas, pengorbanan keterlibatan seorang individu dalam organisasinya merupakan sebuah komitmen profesional. Komitmen profesional menjadi hal penting bagi seorang pegawai untuk memaksimalkan kinerjanya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan komitmen profesional berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* (Elias, 2008; Taylor & Curtis, 2010; Zalmi et al., 2019). Peneliti tertarik meneliti kembali pengaruh komitmen profesional terhadap niat melakukan *whistleblowing* melihat pentingnya komitmen profesional yang harus dimiliki setiap pegawai dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi.

Whistleblowing penting dilakukan dibagian yang rawan terjadinya praktek kecurangan (*fraud*). Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2021 ada 3 sektor unit kerja pemerintah yang rentan dengan terjadinya tindak kecurangan yaitu bagian pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha dan keuangan. DPUPR merupakan unit kerja yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, DPMPTP termasuk unit kerja yang melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal,

dan BPKD merupakan unit kerja yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan. Dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik atau *good governance*, maka unit kerja tersebut harus menciptakan komitmen yang besar, koodinasi yang baik, transparansi, inovasi dan kinerja aparatur yang tanggap serta kontinuitas dan berkesinambungan.

Penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) sebagai teori pendukung. Tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di sektor publik menjadikan *whistleblowing* penting dilakukan bagi pegawai. Serta bisa memberikan masukan kepada organisasi untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Dengan adanya tindakan *whistleblowing* diharapkan bisa mengurangi hingga mencegah kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *MORAL REASONING*, RETALIASI, *ETHICAL SENSITIVITY* DAN KOMITMEN PROFESIONAL TERHADAP NIAT MELAKUKAN *WHISTLEBLOWING*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh *moral reasoning* terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
2. Sejauhmana pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
3. Sejauhmana pengaruh *ethical sensitivity* terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
4. Sejauhmana pengaruh komitmen profesional terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh *moral reasoning* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Mengetahui pengaruh retaliasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
3. Mengetahui pengaruh *ethical sensitivity* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
4. Mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang niat melakukan *whistleblowing*.

2. Bagi Pemerintahan

Menjadi referensi serta bahan informasi dalam memperbaiki sistem *whistleblowing* dan merancang sistem *whistleblowing* yang efektif, serta menerapkan sistem penanganan pengaduan yang lebih baik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi pada sektor pemerintahan

3. Bagi Pembaca

Menjadi sebuah referensi untuk menambah pengetahuan tentang *whistleblowing* dan sebagai bahan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya.